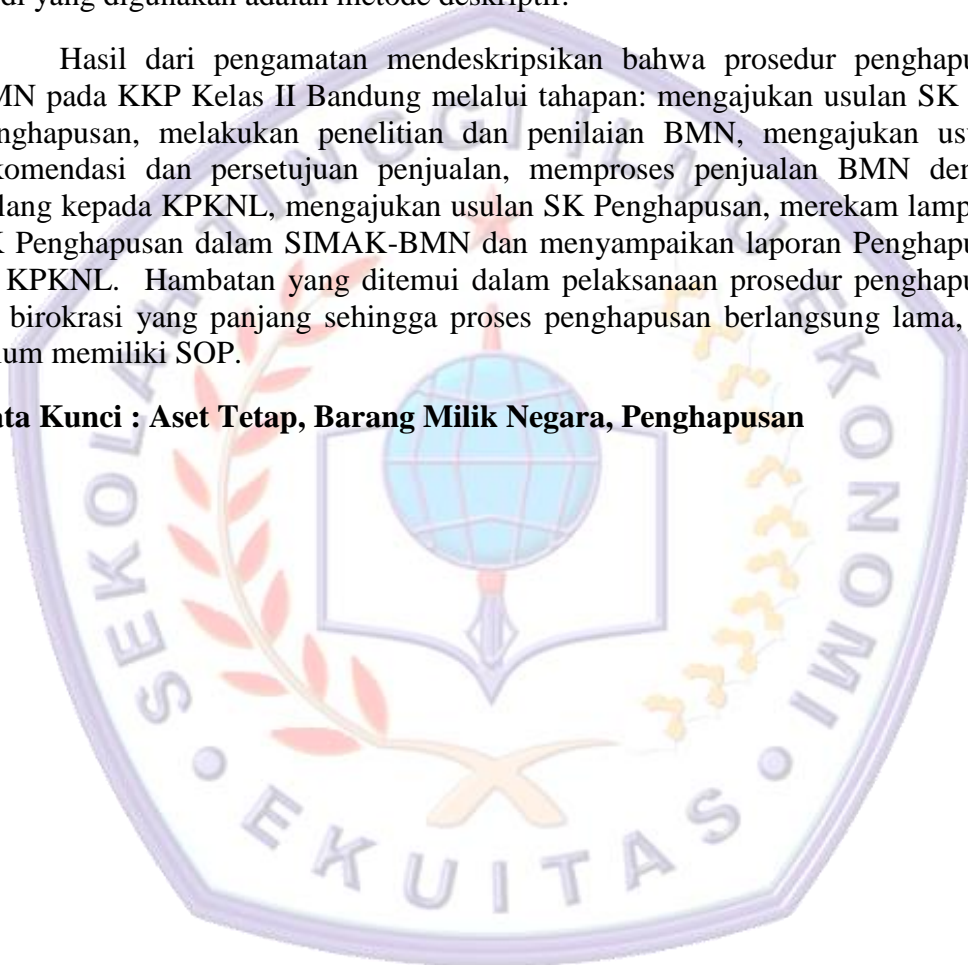


ABSTRAK

Aset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia, nilainya yang signifikan dan kompleksitasnya yang tinggi menjadi penyebab utama perhatian serius dalam Laporan Posisi Keuangan. Aset tetap dalam instansi pemerintahan disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Salah satu pengelolaan BMN adalah penghapusan. Tugas Akhir ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan Prosedur penghapusan BMN di KKP Kelas II Bandung. Metode studi yang digunakan adalah metode deskriptif.

Hasil dari pengamatan mendeskripsikan bahwa prosedur penghapusan BMN pada KKP Kelas II Bandung melalui tahapan: mengajukan usulan SK Tim Penghapusan, melakukan penelitian dan penilaian BMN, mengajukan usulan rekomendasi dan persetujuan penjualan, memproses penjualan BMN dengan Lelang kepada KPKNL, mengajukan usulan SK Penghapusan, merekam lampiran SK Penghapusan dalam SIMAK-BMN dan menyampaikan laporan Penghapusan ke KPKNL. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur penghapusan ini birokrasi yang panjang sehingga proses penghapusan berlangsung lama, dan belum memiliki SOP.

Kata Kunci : Aset Tetap, Barang Milik Negara, Penghapusan



ABSTRACK

Fixed assets have been the main focus of government accounting in Indonesia, whose significant value and high complexity are the main causes of serious attention in the Statement of Financial Position. Fixed assets in government agencies are known as State-owned Assets (BMN). One of BMN's management is writite-off BMN. This final project aims to describe the procedure of writing off BMN at Public Health Of Second Class Bandung . The method used in this final project is a descriptive.

The result of the observation describes that the procedure of write-off BMN at Public Health Of Second Class Bandung is done through some stages: proposing the DECREE of the write-off team, conducting research and assessments of BMN, proposing recommendations and sales approval, processing sales of BMN with the auction to KPKNL, filling a proposal for the DECREE of the write-off BMN, recording the appendixes of the DECREE of the write-off BMN in the SIMAK-BMN, and submitting the report to KPKNL. Resistances encountered in the implementation of the procedure of write-off BMN is the bureaucracy spent a lot of time that impacts to the write-off process. Moreover, another resistance is the procedure of write-off has not had Standard Operating Procedure (SOP) yet.

Key Words : Fixed Assets, State-Owned Assets, Removal